

**PENGARUH BELANJA DAERAH, PENANAMAN MODAL ASING DAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI
PERIODE 2010-2020**

**Ardian Akmal Loeis
Nyoman Djinar Setiawina**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia

Email: ardiloeis@gmail.com/ Telp. 088802164909

ABSTRAK

Semenjak era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk meningkatkan pendapatan mereka untuk menjalankan fungsi alokatif dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Belanja Daerah, Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2010 sampai 2020. Keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika dengan menggunakan program SPSS. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda yang digunakan untuk membuktikan hipotesis pengaruh. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Belanja Daerah dan PMDN memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan PMA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM.

Kata Kunci: *belanja daerah, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, indeks pembangunan manusia*

ABSTRACT

Since the era of regional autonomy and fiscal decentralization in Indonesia, the regional government has the authority to manage their fiscal policy and income in order to govern and prioritize development and public welfare. This research aim is to find the impact of Belanja Daerah, Foreign Direct Investment, and domestic investment on the welfare of the population with Human Development Index as an indicator, in the district and city of Bali Province from year 2010 to 2020. The data used in this research is taken from Badan Pusat Statistik and use SPSS program. Data analysis was carried out using multiple linier regressions, which used to prove the hypothesis. Based on the result of the research, Government expenditure and Domestic Investment has a positive impact and significant on the Human Development Index, on the other hand Foreign Direct Investment has a negative impact on Human Development Index.

Keywords: *governement expenditure, foreign direct investment, domestic investment, human development index*

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar masyarakat mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan (Badan Pusat Statistik, 2015). Tolak ukur pembangunan taraf hidup manusia yang mengandung aspek hidup yang lama dan sehat, edukasi, dan kelayakan hidup dinamakan IPM (UNDP, 1990:13). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

Bedasarkan data dari BPS (2020), capaian Indeks Pembangunan Manusia Indonesia di tahun 2020 adalah 71,94 yang termasuk dalam kategori tinggi, dan berada pada peringkat ke 111 di dunia dan ke 5 di ASEAN. Sedangkan jika melihat pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan indikator pendapatan perkapita, menurut data dari United Nation, pendapatan perkapita Indonesia adalah 4,136 Dolar AS yang berada pada urutan ke 115 dan ada urutan ke 5 di ASEAN.

Provinsi Bali termasuk dalam capaian IPM empat paling tinggi di Indonesia, yaitu 75,50, jika dibandingkan pada urutan pertama adalah Ibukota DKI Jakarta dengan capaian IPM 80,76, kedua DI Jogjakarta 79,99, dan yang ketiga Kalimantan Timur pada 76,61. Dan jika melihat pergerakannya pada periode 2010-2020, IPM Provinsi Bali mengalami fluktuasi dengan tren cenderung meningkat dengan presentase pertumbuhan diatas 1.09% tahun ke tahun (BPS, 2020).

Capaian IPM Provinsi Bali tahun 2020 yang dalam kategori tinggi masih belum merata jika melihat capaian IPM di wilayah Kabupaten/Kota. Berikut adalah

data capaian Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode tahun 2010-2020.

Tabel 1.1. Persentase Indeks Pemabangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode Tahun 2010-2020 (%)

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kab. Jembrana	66,70	68,00	67,94	68,39	68,67	69,66
Kab. Tabanan	70,68	71,00	71,69	72,31	72,68	73,54
Kab. Badung	75,84	77,00	77,26	77,63	77,98	78,86
Kab. Gianyar	71,45	72,00	73,36	74,00	74,29	75,03
Kab. Klungkung	66,01	67,00	67,64	68,08	68,30	68,98
Kab. Bangli	63,43	64,00	64,53	65,47	65,75	66,24
Kab. Karangasem	60,58	62,00	62,95	63,70	64,01	64,68
Kab. Buleleng	66,98	68,00	68,29	68,83	69,19	70,03
Kota Denpasar	79,19	80,00	80,45	81,32	81,65	82,24
Provinsi Bali	70,10	71,00	71,62	72,09	72,48	73,27

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Jembrana	70,38	70,72	71,65	72,35	72,36
Kab. Tabanan	74,19	74,86	75,45	76,16	76,17
Kab. Badung	79,80	80,54	80,87	81,59	81,60
Kab. Gianyar	75,70	76,09	76,61	77,14	77,36
Kab. Klungkung	69,31	70,13	70,90	71,71	71,73
Kab. Bangli	67,03	68,24	68,96	69,35	69,36
Kab. Karangasem	65,23	65,57	66,49	67,34	67,35
Kab. Buleleng	70,65	71,11	71,70	72,30	72,55
Kota Denpasar	82,58	83,01	83,30	83,68	83,93
Provinsi Bali	73,65	74,30	74,77	75,38	75,50

Pada Tabel 1.1. terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali dari tahun 2010 sampai 2020 cenderung meningkat. Pada tahun 2020 terlihat IPM Provinsi Bali berada pada 75.50, dimana IPM yang termasuk dengan kategori sangat tinggi (IPM>80) berada di Kota Denpasar pada 83.93 dan Kabupaten Badung pada

81,60, sedangkan dilain pihak masih terdapat wilayah dengan kategori sedang (60-70) berada di Kabupaten Karangasem dengan capaian 67.35 dan juga Kabupaten Bangli pada 69,36. (BPS Provinsi Bali)

Ketimpangan capaian IPM di Kabupaten/Kota dalam kurun waktu sepuluh tahun ini terlihat menurun, dimana wilayah dengan capaian IPM dengan kategori sedang sudah mulai memasuki capaian IPM kategori tinggi, seperti Kabupaten Buleleng di tahun 2015, Kabupaten Jembrana di tahun 2016, dan Kabupaten Klungkung di tahun 2017. Sedangkan Kabupaten Bangli dan Karangasem masih dalam kategori sedang, akan tetapi sudah mendekati kategori tinggi per tahun 2020.

Peran pemerintah sebagai penyusun kebijakan sangat dibutuhkan untuk memberi kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup melalui keterlibatan masyarakat dalam pembangunan (Anand, 1993). Fungsi pemerintah menurut Dumairy (1999) adalah alokatif, distributif, stabilitif, dan dinamisatif pemerintah harus dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Desentralisasi fiskal di Indonesia dimulai pada era reformasi, pada tanggal 1 Januari 2001. Desentralisasi fiskal dan Otonomi daerah di Indonesia terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015. Kebijakan otonomi daerah merupakan sarana untuk menciptakan pembangunan yang lebih baik, karena kebijakan ini akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dimana pemerintah daerah akan lebih efisien dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia pada masing-masing daerah dan penyediaan barang-barang publik untuk memperlancar kegiatan perekonomian (Oates, 1993). Kebijakan otonomi

daerah memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Regional dalam hal ini Provinsi Bali untuk melaksanakan pembangunan daerah secara lebih mandiri.

Dalam pembangunan ekonomi daerah, proses majunya pertumbuhan suatu daerah sering ditunjukkan dengan tingkat pertumbuhan PDRB dan APBD. Pembangunan daerah dengan APBD merupakan salah satu bentuk campur tangan pemerintah daerah dalam memajukan daerahnya. Maryani (2010) dalam Priambodo (2015) menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan APBD untuk membiayai pembangunan di sektor-sektor terkait pembangunan manusia. Spesifiknya, pemerintah daerah harus bisa mengalokasikan belanja daerah melalui pengeluaran pembangunan di sektor-sektor pendukung untuk meningkatkan IPM.

Dari data yang dilansir BPS (2020), Pendapatan dan Belanja daerah dalam APBD Provinsi Bali dari 2010 sampai dengan 2020 memiliki tren cenderung meningkat. Sedangkan berdasarkan Pendapatan dan Belanja daerah wilayah Kabupaten/Kota setiap daerahnya adalah beragam, dimana yang tertinggi adalah di Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kota Denpasar.

Indonesia sebagai Negara berkembang sudah menerapkan perekonomian terbuka semenjak hari kemerdekaan. Negara dengan perekonomian terbuka adalah negara yang melakukan kegiatan ekspor-impor barang atau jasa serta meminjam atau memberikan pinjaman pada pasar modal dunia (Mankiw, 2005).

Investasi atau Penanaman modal merupakan langkah awal untuk melakukan pembangunan. Menurut Awandari dan Indrajaya (2016) investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan sumber investasi atau

penanaman modal, terdapat dua sumber, penanaman modal pemerintah dan penanaman modal swasta. Penanaman modal swasta dapat berasal dari sektor swasta dalam negeri dan swasta asing. Penanaman modal yang berasal dari dalam negeri yang disebut Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan penanaman modal yang berasal dari luar negeri yang disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Keduanya sama penting dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara (Dumairy, 1996:130).

Pembangunan manusia di Provinsi Bali bersatus tinggi dibandingkan seluruh Provinsi di Indonesia dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun capaian IPM ini belum merata di wilayah Kota dan Kabupaten. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Belanja Daerah, Penanaman Modal Asing, dan Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada tahun 2010 sampai dengan 2020.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Indeks pembangunan Manusia (IPM), APBN dengan Belanja Daerah, Penanaman Modal Asing, dan Penanaman Modal Dalam Negeri di Kabupaten/Kota pada tahun 2010-2020.

Jenis data yang digunakan adalah data panel, yaitu gabungan *time series* dan *cross section*. Data *time series* periode tahun 2010-2020, sedangkan data *cross section* adalah 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data analisis regresi linear berganda, pengujian simultan dengan Uji F, pengujian parsial dengan Uji t, pengujian model estimasi dengan asumsi klasik. Bentuk umum persamaan dari analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut;

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Y = Variabel Indeks Pembangunan Manusia

β_0 = Intersep/konstanta

X1 = Variabel Belanja Daerah

X2 = Variabel Penanaman Modal Asing

X3 = Variabel Penanaman Modal Dalam Negeri

β_1, \dots, β_3 = Koefisien dari masing-masing regresi X

e = Variabel pengganggu (*residual error*)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Signifikansi Koefisien Secara Parsial (Uji t)

Untuk mengetahui pengaruh Belanja Daerah, Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri secara parsial terhadap Indeks Pemabangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dilakukan dengan uji t dengan hasil sebagai berikut;

1) Pengaruh Belanja Daerah (X1) Terhadap Indek Pembangunan Manusia (Y)

Nilai *Unstandardized Coefficients Beta* Belanja Daerah sebesar 0,094 dengan sig 0,000 < 0,05 maka H_0 ditolak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belanja

daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Mehmood dan Sadiq (2010), Soejoto dkk. Dimana didapatkan kesimpulan semakin tinggi belanja pemerintah maka semakin tinggi IPM.

2) Pengaruh Penanaman Modal Asing (X2) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Nilai *Unstandardized Coefficients* Penanaman Modal Asing sebesar -0,002 dengan sig 0,522 > 0,05 maka H_1 ditolak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PMA secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Temuan ini sesuai dengan penelitian Ana (2015) yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan juga negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3) Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (X3) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Nilai *Unstandardized Coefficients Beta* Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar 0,010 dengan sig 0,005 < 0,05 maka H_0 ditolak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PMDN secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini sejalan dengan temuan Ningrum (2015) yang mengatakan bahwa dengan meningkatnya PMDN maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Hal ini dapat disebabkan modal dan keuntungan yang diterima berputar di dalam negeri, berbeda dengan PMA yang berpengaruh negative dan signifikan pada IPM yang modal serta keuntungannya dibawa keluar atau negara asalnya sehingga menyebabkan perekonomian lesu.

Uji Signifikansi Koefisien Secara Simultan (Uji F)

Belanja Daerah, Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dilakukan dengan uji F, dengan membandingkan nilai Fhitung yang dihasilkan dengan nilai Ftabel. Sesuai dengan analisis perhitungan dengan menggunakan model estimasi linear berganda dengan tingkat kepercayaan 5 persen diperoleh hasil Fhitung 31.705.

Tabel 4.12. Uji Simultan

Regresi	F hitung	P. Value/sig.	Keterangan
$X_1, X_2, X_3 \rightarrow Y_1$	31.705	0,000	Positif dan Signifikan

Sumber: Lampiran 2 (data diolah, 2021)

Berdasarkan Tabel 4.12., uji secara simultan variabel Belanja Daerah, PMA dan PMDN secara simultan berpengaruh terhadap terhadap IPM. pada *level of significant* 5 persen, hal ini dapat dilihat nilai F hitung sebesar 31,705 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti secara simultan variabel Belanja Daerah, Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri secara simultan berpengaruh terhadap terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah dan Penanaman Modal Dalam Negeri secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.
- 2) Penanaman Modal Asing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.
- 3) Variabel yang berpengaruh dominan terhadap Indeks Pembangunan Manusia adalah Belanja Daerah.

SARAN

Bedasarkan hasil penelitian, dapat dikumpulkan beberapa saran sebagai berikut;

- 1) Dalam upaya meningkatkan IPM di Kabupaten/Kota, pemerintah masing-masing daerah tingkat II dapat mengelola kebijakan fiskal melalui APBD dan mengarahkan belanja daerah yang terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap IPM tersebut.
- 2) Realisasi belanja daerah tidak terlepas dari nilai penerimaan masing-masing wilayah administratif tingkat 2. Dari sisi pemerintah daerah tingkat 2 dapat mengelola pendapatan daerah melalui sumber daya daerah untuk meningkatkan PAD.

Investasi swasta berupa PMDN maupun PMA dapat dipengaruhi dari faktor ekonomi dan non-ekonomi sesuai dengan yang disebutkan di Kajian ekonomi regional Bank Indonesia (2007). Dalam upaya peningkatan PMDN maupun PMA di wilayah penelitian, pemerintah daerah Kabupaten dan Kota dapat mengoptimalkan

infrastruktur dasar, kemudahan dan keamanan berusaha, menjaga kestabilan politik dan juga keamanan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Awandari dan Indrajaya. 2016. *Pengaruh Infrastruktur, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja*. E-Jurnal EP Unud, 5 [12]: 1435-1462

Algifari. 2000. *Analisis Regresi, Teori, Kasus & Solusi*. BPFE UGM. Yogyakarta.

Anand, Sudhir and Martin Ravallion. (1993). "Human Development in Poor Countries: On the Role of Private Incomes and Public Services". *The Journal of Economic Perspectives*. Vol. 7. No. 1 (Winter, 1993): 133-150.

Azril. (2000). "Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol. 15. No.1, 2000:1-14

Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Mankiw, Gregory. N. 2003, *Teori Makroekonomi*, Penerbit Erlangga, Jakarta

Maryani, Tri. 2010. *Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah*. Fakultas Ekonomi UPN Yogyakarta.

Mulyaningsih, Yani. 2011. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah*. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Juli 2011. Volume 1. Nomor 1.

Oates, Wallace E. (1993). Fiscal Decentralization and Economic.
Development National Tax Journal. Vol. 46, no. 2.

Todaro, Michael P. 2006. *Pemabangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi 9*.
Erlangga. Jakarta.

UNDP. (1990). *The Human Development Report: UNDP*.